

The Next Kotaku: Program Keberlanjutan Penanganan Slum Area Di Kelurahan Lappa

M. Nurbadri Hatta*

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Fadilah Alifiyatunnisa

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Muh Fadel Bijaksana

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Nurbaity

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Afdan Maulana

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Korespondensi penulis: fadillahalifiyatunnisa@gmail.com

Abstract. *This research was conducted with the aim of knowing the evaluation of the implementation of the City Without Slums Program (KOTAKU) in Lappa Village, Sinjai City, and the impact of implementing the City Without Slums Program (KOTAKU) in Lappa Village, Sinjai City. This research used a qualitative research type with a descriptive approach. Data collection techniques carried out using observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the condition of the basic housing infrastructure in the Lappa sub-district is still poor or inadequate as a residential area. There are several infrastructures with poor or inadequate conditions such as drainage networks. Meanwhile, infrastructure conditions that have a moderate level of condition are the road network, drinking water and solid waste infrastructure.*

Keywords: *KOTAKU Programs, Cities Without Slums, Slums.*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Lappa Kota Sinjai, dan dampak dari pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Lappa Kota Sinjai, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi prasarana dasar Permukiman di Kelurahan Lappa masih buruk atau masih belum memadai sebagai Kawasan Permukiman. Terdapat beberapa prasarana dengan kondisi yang buruk atau belum memadai seperti jaringan drainase. Adapun kondisi prasarana yang memiliki tingkat kondisi dengan kategori sedang adalah jaringan jalan, air minum dan prasarana persampahan.

Kata Kunci: Program KOTAKU, Kota Tanpa Kumuh, Permukiman Kumuh.

*M. Nurbadri Hatta, nurbadrihatta@umsi.ac.id

LATAR BELAKANG

Mengenai ciri ciri permukiman yang disebut kumuh, yaitu lingkungan hidup padat, kondisi sosial ekonomi rendah, keramaian Akomodasi yang sangat ramai dengan kualitas buruk lingkungan hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan Perawatan kesehatan yang didirikan di atas properti pemerintah dan atau dimiliki dan dioperasikan oleh orang lain hukum dan peraturan yang berlaku Keberadaan permukiman kumuh (kawasan kumuh) jelas membebani kota masing-masing. Masalah ini menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan yang meningkatkan risiko kerentanan, dan konflik sosial penurunan kesehatan masyarakat, dan Penurunan kualitas sarana prasarana pelayanan. Oleh karena itu koloni Perkampungan kumuh (slum area) harus segera ditangani minimal penukiman kumuh (slum area) diminimalkan, bahkan keberadaan pemukiman kumuh yang ada sekarang harus berangsur-angsur berubah menjadi kawasan pemukiman dan permukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur (Khomarudin, 1997).

Program KOTAKU adalah program untuk memperbaiki kawasan kumuh perkotaan, termasuk perbaikan dan peningkatan mobilitas Jalan, perumahan tidak layak huni, drainase, sanitasi, jembatan dan lain-lain. Dana yang digunakan dalam program ini adalah pinjaman oleh Asian Development Bank (ADB) berdasarkan kontrak no. 3122-INO dan ditandatangani pada tanggal 23 April 2014. Program ini memiliki dilaksanakan di 271 kabupaten/kota administratif di 34 provinsi yang tergabung dalam platform tersebut berdasarkan kerjasama atau prioritas pengobatan.

Dampak program KOTAKU berhasil Pengurangan kawasan kumuh di beberapa kawasan pengolahan prioritas dalam beberapa tahun terakhir. Namun, program pemrosesan berfungsi hanya berorientasi pada penggunaan fisik dan tidak ada inovasi pengolahan berkelanjutan ini tidak berpengaruh. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) ke-11 yaitu "Sampai 2030 Memastikan Rerumahan yang memadai, aman dan terjangkau serta layanan dasar untuk semua Pelayanan dan peningkatan kawasan kumuh (UN Habitat, 2016). Beberapa negara Berurusan dengan daerah kumah melalui intervensi fisik juga jelas gejala serupa (Andreasen & Maller-Jensen, 2016; Sticzay & Koch, 2015) Itu menunjukkan bahwa perhatian memang meningkat dalam menangani daerah kumuh, tetapi tidak ada solusi perlakuan yang adil dan berkelanjutan yang diterima secara luas

dari semua kelompok (Elravies, 2016: Mahabir et al., 2016, Sibyan, 2020, Singh, 2014, Turok & Borel-Saladin, 2018).

Salah satu permukiman kumuh di kawasan Sinjai Utara Ini menjadi proyek percontohan yang dikelola oleh program KOTAKU terletak di desa Lappa. Desa ini merupakan kawasan industri perikanan dan kelautan terbesar di Kabupaten Sinjai. Jantung industri perikanan Sulawesi Selatan. Tapi di belakang Secara keseluruhan Kelurahan Lappa memiliki wajah yang berbeda di perkotaan yang menjadi keluhannya. Di kawasan kumuh terbesar di Kabupaten Sinjai yang tersebar luas. Luas kawasan kumuh 30 ha, dan kepadatan penduduk mencapai 30 ha 11.765 jiwa tersebar di 21 RT/RW di beberapa perumahan lingkungan.

Berdasarkan hasil studi observasi di daerah penelitian dan kita diskusikan masalah ini dengan komunitas lokal lappa. Permukiman kumuh. Permukiman kumuh di wilayahnya menunjukkan kondisi fisik Sarana dan prasarana kawasan Lappa yang ada saat ini masih ada tidak teratur (berasap), untuk pembuangan air kotor tidak diurus benar dan memadai. Di beberapa permukiman mereka masih ada Tidak ada fasilitas sanitasi untuk pembuangan limbah Rumah penduduk dibuang tanpa udara langsung ke selokan lingkungan dengan cara direndam fasilitas air bersih di Keluhkan Sebagian besar masyarakat di Lappa sudah memiliki pipa air bersih. Ada yang membeli air dari pedagang yang menjualnya air PAM. Skala hasil pengamatan ilmiah di bidang penelitian dapat dikenali RPLP (Rencana Pembangunan Perumahan) 2016. Desa Lappa adalah tentang buruknya kualitas lingkungan di wilayah pesisir yang bercampur dengan fungsi perdagangan eceran dan perumahan system jaringan pembuangan limbah tidak terintegrasi dalam sistem kota. Sedimentasi drainase sekunder. Sistem pengolahan limbah padat masih cukup, ketidakberesan bangunan selama pemeriksaan dan kurangnya proteksi kebakaran, Kondisi sosial ekonomi masyarakat dominan sekitar pekerjaan sebagai nelayan dan pendapatan rendah. Hal ini mempengaruhi kualitas laporan dan ke lingkungan berupa genangan air, karena masih ada jalan tanpa lingkungan dan drainase yang buruk. Kondisi ini Keadaan di atas diperparah ketika musim hujan yang menyebabkan air meluap. Mengenai aspek sosial, khususnya keterlibatan sosial menjaga lingkungan dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan kumuh Cukup adil namun sebagian masyarakat masih apatis dan acuh tak acuh dengan model kebersihan mereka.

Program KOTAKU Lappa Keluhkan dalam implementasi fasilitas dan infrastruktur yang ada sudah mengimplementasikan 70% dari perubahan - Perubahan struktur pembangunan menjadi lebih baik berupa perbandingan infrastruktur di ketiga wilayah tersebut. Prioritas pengolahan lingkungan Larea-rea, Lengkong'e dan Lappa'e. Pekerjaan infrastruktur yang dilakukan adalah perbaikan dan Penambahan selokan dengan tutup filter, perbaikan jalan dan peningkatan jalan beraspal pengadaan MCK umum dan Penerimaan pembuangan sampah berupa bak, truk, tempat pembuangan sampah, dan penciptaan ruang terbuka Hijau (RTH) dan kesadaran masyarakat dalam bentuk partisipasi komunitas yang berperan aktif dalam membangun dan mempertahankannya Infrastruktur dibangun di wilayahnya, Implementasi pengolahan permukiman kumuh di Lappa.

Oleh karena itu, alasan yang melatar belakangi kelompok kami memilih penelitian ini yaitu kami ingin melanjutkan program Kotaku dengan menambahkan Nama Program dan konsep baru dengan nama The Next Kotaku untuk memperbaiki tatanan Kawasan yang dimana awalnya kumuh dan kurang layak di buni menjadi Kawasan yang nyaman dan layak huni. Kami juga ingin mengembangkan kualitas penduduk di bidang perekonomian dan meminimalisirkan pengangguran sehingga aktivitas dalam Kawasan tersebut layak dan nyaman. Dengan kata lain untuk mengimplementasikan penanganan pemukiman kumuh di masa mendatang, yang hasilnya diharapkan akan meningkatkan kontribusi praktis dan politis bagi pemangku kepentingan terkait di masa mendatang.

KAJIAN TEORITIS

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah ditetapkan bahwa Program Kotaku masih kurang pengimplementasiannya maka perlu di uraikan beberapa batasan pengertian yang relevan sebagai dasar kerangka teoritis dan analisis dalam melakukan pembahasan lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, maka kajian teori yang akan dijelaskan sebagai dasar dalam pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Konsep Kawasan Tidak Layak Huni

Kawasan tidak layak huni sering disebut sebagai permukiman kumuh, begitu juga sebaliknya. Permukiman kumuh adalah kumpulan rumah yang tidak memenuhi prasarana dan sarana lingkungan yang layak (Handryant, 2012).

Kebijakan Program Kota Tanpa Kawasan Tidak Layak Huni (KOTAKU)

Program Kota Tanpa Kawasan Tidak Layak Huni (KOTAKU) adalah program nasional untuk mencegah dan meningkatkan kualitas kawasan tidak layak huni yang merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jendral Cipta Karya tahun 2015-2019. Adapun indikator hasil yang akan dicapai dari program KOTAKU (Kota Tanpa Kawasan Tidak Layak Huni) adalah sebagai berikut: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan tidak layak huni sesuai dengan standar yang ditetapkan (antara lain: drainase, air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, proteksi kebakaran), Menurunnya luasan kawasan tidak layak huni karena adanya akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik, Pembentukan dan operasionalisasi lembaga Pokja PKP (Pokok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman) di tingkat kabupaten/kota bertujuan untuk mendukung program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Para penerima manfaat merasa puas dengan mutu fasilitas dan pelayanan perkotaan di permukiman yang tadinya kumuh, dan Kesejahteraan masyarakat meningkat melalui upaya mendorong penghidupan yang berkelanjutan di wilayah yang dahulunya terlantar.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana peneliti melihat secara langsung keadaan yang ada tanpa mengubah peristiwa yang terjadi di lapangan, dan setelah itu membuat catatan penelitian lapangan dan mendeskripsikan keadaan yang ada di lapangan. Lokasi dan Waktu Penelitian, ini dilakukan di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai mulai pada Mei – Juni 2023. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer dan Data sekunder. Adapun Teknik Pengumpulan Data yaitu Studi Pustaka, Observasi, Wawancara secara langsung dengan masyarakat setempat, dan juga hasil dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awalnya Kelurahan Lappa adalah sebuah desa. Pada tahun 1977 diadakan pemekaran rumah di Kelurahan Lappa. Hampir seluruh rumah diangkat dan di buat menghadap ke jalan. Dengan adanya perkembangan yang terjadi, Pemerintah berinisiatif

untuk membuat Desa Lappa menjadi Kelurahan. Tidak disebutkan secara spesifik tahun berapa Desa Lappa berubah menjadi Kelurahan. Kelurahan Lappa merupakan salah satu kelurahan dalam lingkup kecamatan Sinjai utara yang merupakan ibu kota Sinjai dengan luas wilayah 395 Ha dan memiliki jumlah penduduk 13.694 jiwa dan 3.510 KK. Secara geografis batasan wilayah kelurahan Lappa adalah Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Tangka kabupaten Bone, Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Sinjai Kecamatan Sinjai Timur dan Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Balangnipa dan Sungai Tangka. Kelurahan lappa terdiri dari 7 lingkungan yakni lingkungan Baru, Kokoe, Lengkong, Lappae, Talibung, Tappae dan Larea-rea. Yang di mana Lingkungan Baru merupakan lingkungan yang paling luas pada Kelurahan Lappa yakni 46,32 dari luas keseluruhan wilayah kelurahan.

1. Kependudukan

Tabel.1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Nama Lingkungan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah (jiwa)	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Tappe'e	522	411	835	213
2.	Lappa'e	1.435	1.383	2.702	737
3.	Talibunging	923	790	1.585	413
4.	Lengkong	1.135	1.035	2.042	548
5.	Baru	1.553	1.480	2.931	729
6.	Larea-rea	563	439	1.097	250
7.	Kokoe	893	829	1.605	446
	Jumlah	7.034	7.050	14.168	3.336

Sumber: BPS Sinjai (2022)

Dari tabel diatas, dapat diketahui jumlah penduduk di Kelurahan Lappa didominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan. Selain itu, dapat disimpulkan penduduk terbanyak ada di Lingkungan Baru dan yang paling sedikit di Lingkungan Tappe'e.

2. Persampahan

Jaringan persampahan adalah suatu jalan yang dilakukan dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah. Masyarakat Kelurahan Lappa pada umumnya dan wilayah studi pada khususnya masih membuang sampah di sembarang tempat misalnya di lahan kosong, jalanan, maupun di selokan atau dengan cara dikumpulkan di lahan kosong lalu dibakar. Kebiasaan masyarakat membuang sampah di sembarang tempat di akibatkan oleh kurangnya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ada di lokasi wilayah studi.



Gambar 1. Kondisi Persampahan Di Kelurahan Lappa

Sumber: Dokumentasi dan Survei Lapangan (2023).

Berdasarkan kondisi persampahan dan hasil analisis yang dilakukan, maka perlu adanya skema sistem persampahan di lokasi penelitian. Berikut skema sistem persampahan di Kelurahan Lappa:



Gambar 2. Skema Perencanaan Pembuangan Sampah Di Kelurahan Lappa

3. Pola Konsep *The Next Kotaku*

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Tjokroamidjodjo (1986) bahwa perencanaan merupakan hal yang penting, karena terdapatnya suatu pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu melalui perencanaan yang baik dapat disusun suatu prioritas, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dengan baik, tujuan yang diinginkan dapat tercapai dan memperoleh manfaat yang optimal.

Adapun pola yang kami aplikasikan dalam menjalankan konsep dari *the next kotaku* yaitu dengan menggunakan pola pemugaran seperti; Rehabilitasi Fisik Bangunan: Pemugaran dimulai dengan memperbaiki kondisi fisik bangunan di kawasan kumuh, Bangunan yang rusak atau tidak layak huni direnovasi atau direkonstruksi untuk memastikan bahwa mereka aman dan sesuai dengan standar bangunan yang berlaku. Pola ini melibatkan untuk merekonstruksi fisik kawasan kumuh termasuk perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, dan system sanitasi, Penataan Ruang: Pemugaran juga melibatkan penataan ruang di kawasan kumuh. Hal ini dapat meliputi pembangunan atau perluasan jalan, penambahan area terbuka hijau, pembuatan trotoar, atau penataan kembali kawasan tersebut agar lebih berfungsi dan estetis, Infrastruktur Dasar: Peningkatan infrastruktur dasar, seperti pasokan air bersih, saluran pembuangan air limbah, dan sistem sanitasi yang memadai, merupakan bagian penting dari pemugaran kawasan kumuh. Ini membantu meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mengurangi risiko penyakit., dan Pembangunan Ekonomi: Salah satu aspek penting dalam pemugaran kawasan kumuh adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ini dapat melibatkan

pemberian pelatihan keterampilan kepada penduduk, pengembangan usaha kecil dan menengah, atau program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka kesimpulannya yaitu kondisi infrastruktur dasar permukiman di Kelurahan Lappa masih buruk atau masih belum memadai sebagai kawasan permukiman; di mana terdapat beberapa prasarana dengan kondisi yang buruk atau belum memadai seperti jaringan drainase. Adapun kondisi prasarana yang memiliki tingkat kondisi dengan kategori sedang adalah jaringan jalan, air minum dan prasarana persampahan, dan prasarana dasar permukiman yang perlu ditingkatkan untuk tahun kedepan yaitu prasarana air minum dan prasarana persampahan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengawasan dan pengoptimalan fungsi prasarana oleh pihak terkait seperti pemerintah dan masyarakat itu sendiri dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang di permukiman Kelurahan Lappa.
2. Perlunya normalisasi peningkatan pelayanan drainase berupa, peningkatan saluran drainase dan pembangunan saluran drainase.
3. Peningkatan pelayanan sanitasi lingkungan, seperti pengadaan gerobak dan kontainer sampah, serta sosialisasi/penyuluhan kebersihan lingkungan.
4. Peningkatan layanan air minum seperti, pembangunan jaringan air minum, pemasangan pipa baru dan optimalisasi sumber air minum.
5. Perlu adanya peran masyarakat dalam proses peningkatan kualitas terhadap permukiman sampai pada tahap pengelolaan permukiman kumuh agar program-program penataan bukan hanya sekedar wacana akan tetapi dapat berjalan sampai pada tahap pelaksanaan dan juga lebih ditekankan pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif untuk peningkatan potensi ekonomi lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Tommy, F. (2006). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus: Kawasan Pancuran, Salatiga). *Tesis*. Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota.
- Handryant, A. N. (2012). Permukiman Kumuh, Sebuah Kegagalan Pemenuhan Aspek Permukiman Islami. *Journal of Islamic Architecture*, 1(3).
- <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9952/1/Muhammad%20Ayat%20pdf.pdf>
- http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/15527/2/P022181003_tesis_Bab%201-2.pdf
- <https://www.sinjaikab.go.id/v4/wp-content/uploads/2022/01/STATISTIK-KOMINFO-2021.pdf>
- Tjuk. 2005. Perumahan dan Permukiman di Indonesia. Bandung:Penerbit ITB. Panduan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh oleh direktorat pengembangan permukiman (2015).